JURNAL GOVERNANCE
Vol.3, No. 1, 2023
ISSN: 2088-2815

Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Motoling Timur

Oleh:
Jhoner E. S. Rambet[1]
Fanley N. Pangemanan[2]
Gustaf Undap[3]

Email Korespondensi: jhonerrembet01@gmail.com

Abstrak

Salah satu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produktivitas petani bagia kesejahteraan masyarakat adalah Balai Penyuluh Pertanian (BPP), yang mana pelayanannya berupa penyuluhan dan pendampingan program pemerintah di bidang pertanian. Inilah yang menjadi tolok ukur dari penelitian dan pembahasan ini.Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini ialah: Bagaimana kinerja Balai Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura di Kecamatan Motoling Timur. Hasil penelitian menurut teori lima ukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Keseluruhan hasil dari kelima indikator ukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto tersebut menunjukkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Motoling Timur dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura sudah cukup efektif, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kendala dimasyarakat yang harus segera ditangani dan perlu adanya peningkatan kualitas baik dari segi pelayanan dan penyuluhan, kesesuaian program dengan kebutuhan di lapangan, serta lebih peka lagi dengan masalah-masalah atau keluhan yang dihadapi oleh masyarakat agar tercapai tujuan yang diharapkan baik oleh pemerintah dalam hal ini BPP Kecamatan Motoling Timur bahkan para petani yang adalah masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja, Balai Penyuluhan Pertanian, Produksi, Hortikultura

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu sektor utama penunjang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Pemanfaatan sektor pertanian tersebut seharusnya menjadi perhatian bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga pemerintah yang merupakan penggerak perekonomian masyarakat. Tentunya hal tersebut dapat dimaksimalkan, jika pemerintah memiliki andil yang cukup untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Bahkan Pemerintah tidak dapat dipisahkan dengan petani, seperti sosok Bung Karno yang menganggap petani sebagai tulang punggung bagi identitas Indonesia, oleh karena itu Bung Karno jugalah yang memberikan sebuah kepanjangan khusus untuk kata "petani", yakni sebagai Penjaga Tatanan Negara Indonesia, yang disampaikannya pertama kali pada tahun 1952. Oleh karena itu, petani selalu dipandang spesial sebagai penjaga ketahanan pangan.

Peningkatan produksi pertanian akan berpengaruh bagi petani baik dari segi pendapatan maupun kesejahteraan petani. Namun petani sering kali dihadapkan pada permasalahan pengetahuan tentang pertanian yang masih relatif rendah, keterbatasan modal, lahan garapan yang sempit, serta kurangnya keterampilan petani yang nantinya akan berpengaruh pada penghasilan petani (Asmarantaka, 2012). Sektor pertanian masih menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia di mana sampai saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil hingga menengah. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian (Kementan, 2018).

Sejalan dengan hal ini, sektor pertanian dibagi dalam lima sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Salah satu sub sektor yang berperan besar dalam kemajuan pertanian Indonesia yaitu sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Hortikultura merupakan bidang pertanian yang cukup luas yang mencakup sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga yang secara keseluruhan dapat ditemukan pada ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut, maka dari itu areal yang ada di Indonesia sangat berpotensi dalam budidaya tanaman hortikultura. Pembangunan sub sektor tanaman hortikultura pada dasarnya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian dalam upaya mewujudkan pembangunan secara nasional (Rahardi, *et al*. 2003).

Maka tanaman hortikultura sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura memiliki landasan hukum yang sah, diatur secara jelas dan terperinci baik mengenai Ketentuan umum; Asas, tujuan, dan lingkup peraturan; Perencanaan hortikultura; Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; Pengembangan hortikultura; Distribusi, perdagangan, pemasaran dan konsumsi; Pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; Sistem informasi; Penelitian dan pengembangan; Pemberdayaan; Kelembagaan; Pengawasan; Peran serta masyarakat; Sanksi administratif; Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup. Oleh aturan tersebut menegaskan bahwa tanaman hortikultura regulasinya telah jelas dilindungi oleh undang-undang. Dan

karenanya pemerintah memiliki tanggung jawab baik dalam proses *input* maupun *output*. Yang dimaksud *input* di sini ialah proses persiapan produksi sedangkan *output* ialah sesudah produksi atau hasil produksi. Memang tidak secara penuh pemerintah bertanggung jawab dalam proses produksi hasil pertanian, karena itu juga tergantung para petani yang merupakan penggerak utama. Tetapi, keberhasilan produksi pertanian juga diperoleh oleh kinerja pemerintah dalam mengupayakan hal tersebut.

Seperti organisasi pada umumnya, pemerintah juga berusaha untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin. Kinerja pemerintah dapat dalam bentuk pelayanan publik, resapan anggaran, capaian *output* dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dari instansi pemerintah. Semua organisasi sektor publik bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat di bidang-bidang tertentu (Mochamad Muslih, *et al*. 2019). Kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan tergantung banyak variabel, misalnya besar institusi dan kondisi tata kelolanya.

Dari berbagai instansi pemerintah, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan salah satu organisasi sektor publik yang membidangi pelayanan publik di bidang pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Dinas pertanian atau sejenisnya yang merupakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau menyesuaikan dengan faktor kebutuhan di daerah. Di mana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berlokasi di tiap-tiap kecamatan, dan dipimpin oleh Koordinator dan dibantu oleh Penyuluh Pertanian yang memegang wilayah kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). Penyuluhan pertanian memiliki peran strategis sebagai *"agent of change"* untuk mempercepat pembangunan pertanian. Sebab dengan hal itu, kualitas sumber daya manusia dan kuantitas hasil pertanian juga akan meningkat sesuai kebutuhan zaman. Sebagaimana salah satu tugas dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yakni melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan, maka Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) semestinya dituntut secara aktif dan inovatif untuk melaksanakan penyuluhan demi pembangunan sumber daya manusia pertanian dan lahan garapan pertanian yang sukses atau berhasil, hal ini pun telah diatur dengan landasan hukum yang jelas, yakni dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Walaupun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terus mengusahakan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal di bidang pertanian, tetapi tetap ada saja faktor penghambat baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Faktor penghambat secara internal yang dimaksud tersebut diantaranya, kurangnya personil Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sesuai struktur organisasi yang ada bahkan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang memiliki disiplin ilmu yang memadai untuk mengembangkan potensi pertanian, selain itu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki (misalnya peralatan kantor, kendaraan dinas, alat bantu/peraga penyuluh) belum memadai sesuai dengan jumlah

dan jenis yang dibutuhkan. Sehingga, ada beberapa program dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang tidak terlaksana sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pun secara eksternal di mana masih ada saja masyarakat yang kurang proaktif dalam menerapkan cara bertani sesuai penyuluhan yang telah dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau dengan kata lain masih bertani secara tradisional, selain itu juga masyarakat hanya mau bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam memajukan pertanian jika diberi bantuan (misalnya pupuk, alat penunjang pertanian dan sejenisnya). Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, maka Balai Penyuluhan Pertanian perlu untuk di teliti kinerjanya.

Kecamatan Motoling Timur cukup dikenal di wilayah selatan Minahasa, akan hasil pertanian yang melimpah. Khususnya disektor tanaman perkebunan dalam hal ini captikus (minuman tradisional beralkohol), gula aren dan kopra. Namun di tiga tahun terakhir ini, tanaman hortikultura khususnya tanaman cabai di kecamatan Motoling Timur berkembang cukup pesat produksinya. Sentra perkembangan tanaman hortikultura berpusat di wilayah perkebunan desa Picuan dan Picuan Satu. Hal ini disebabkan oleh karena pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat mengalami penurunan karena harga jual tanaman perkebunan yang merosot. Sehingga memaksa masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian di bidang lainnya, yakni hortikultura khususnya tanaman cabai yang memiliki harga jual tinggi dan cukup stabil dibanding sektor tanaman perkebunan.

Sejak awal mula perkembangannya, produksi tanaman hortikultura khususnya cabai di kecamatan Motoling Timur yang sentra perkembangannya di wilayah perkebunan desa Picuan dan Picuan Satu hanya dilakukan oleh beberapa petani saja, tetapi melihat peluang pasar dan harga jual yang tinggi maka *trend* menanam cabai menjamur ke seluruh lapisan masyarakat. Dan dalam banyak tantangan yang ada baik dari dalam, maupun dari luar tidak memudarkan semangat para petani, hingga kecamatan Motoling Timur khususnya di wilayah desa Picuan dan Picuan Satu yang terkenal dengan hasil perkebunan yakni captikus, gula aren dan kopra kini telah menjadi desa penghasil tanaman hortikultura khususnya cabai di kabupaten Minahasa Selatan dengan produksi per minggu mencapai kurang lebih satu ton.

Tetapi walaupun produksinya sudah cukup tinggi, petani tetap saja masih mengalami beberapa masalah atau kendala di lapangan, misalnya hama yang membuat produksi tanaman hortikultura khususnya cabai sering berkurang atau tidak sesuai harapan petani, hal ini tak lepas dari masih kurangnya usaha dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam melakukan penyuluhan tentang penanganan hama secara konstan. Begitu pun sebaliknya, kurangnya perhatian masyarakat untuk menerapkan cara bertani yang benar agar terhindar dari hama. Selanjutnya, masalah lain yaitu penanganan pascapanen cabai yang dikatakan hampir belum sepenuhnya dilaksanakan para petani karena terbatasnya pengetahuan dan fasilitas. Selain itu, kejelasan spesifikasi produk yang diinginkan konsumen tidak diketahui secara jelas

oleh petani. Spesifikasi produk hanya diketahui oleh pedagang pengumpul, sehingga keadaan ini menyebabkan daya tawar petani lebih rendah dari pada daya tawar pedagang pengumpul.

Maka dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik ingin meneliti tentang "Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian dalam Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura di Kecamatan Motoling Timur".

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan tentang seseorang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan semua data dan objek penelitian atau situasi objek penelitian, menganalisis dan membandingkannya berdasarkan kenyataan saat ini, dan mencoba memberikan solusi untuk masalah, sehingga tetap *up to date*. Informasi berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan pada berbagai masalah. Secara umum penelitian deskriptif adalah kegiatan penelitian yang berusaha menggambarkan peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual, dan akurat.

Ada beberapa alasan untuk menggunakan metode kualitatif ini. Ini berarti bahwa metode kualitatif lebih mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan berbagai realitas. Metode ini lebih sensitif karena secara langsung mewakili sifat hubungan antara peneliti dan responden. Mampu mengadaptasi dan mempertajam interaksi nilai dan pola perilaku yang dihadapi peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta tentang kinerja pemerintah khususnya Balai Penyuluhan Pertanian terkait dengan upaya meningkatkan produksi tanaman hortikultura di kecamatan Motoling Timur.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena beberapa alasan, diantaranya peneliti merupakan penduduk asli di lokasi penelitian, hal ini untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian baik jarak, waktu dan tenaga. Selanjutnya ketertarikan peneliti akan dunia pertanian, mendorong peneliti untuk mencari tahu lebih tentang masalah pada instansi terkait.

Fokus Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada masalah pokok sesuai judul penelitian yang diangkat, yakni kinerja pemerintah khususnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura di Kecamatan Motoling Timur. Dengan menggunakan pendekatan teori dari Agus Dwiyanto (2006:50) tentang beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yakni: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Produktivitas

Produktivitas kerja aparatur pemerintah adalah perbandingan antara kualitas pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai hasil, di mana produktivitas adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang nyata dan non material, yang menggambarkan kemampuan

kerja dari aparatur tersebut. Instansi pemerintah yakni Balai Penyuluhan Pertanian yang profesional di bidangnya sangat dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan semua tugas yang telah direncanakan. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan aparatur pemerintah yang profesional dalam bidangnya. Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut atau hubungan antara kualitas barang dan kuantitas dan jasa yang dihasilkan serta jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan. Produktivitas merupakan kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan.

Produktivitas, daya produksi, atau keproduktifan merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran dengan masukan. Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental/perilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan *(continuous improvement),* dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola pikir yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu berbuat yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan masyarakat yang merupakan petani tanaman hortikultura khususnya cabai tentang produktivitas kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura terlihat bahwa ada masyarakat yang sudah merasa puas dengan pelayanannya, tetapi tidak bisa dipungkiri juga masih banyak masyarakat yang merasa kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur belum sesuai dengan harapan mereka. Hal ini disebabkan oleh karena intensitas penyuluhan dari para penyuluh pertanian belum secara konstan dilakukan, yang menyebabkan kebutuhan penyuluhan tidak dirasa secara merata oleh masyarakat, selain itu keluhan-keluhan dari para petani di lapangan khususnya mengenai ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum memadai, belum bisa diupayakan oleh Balai Penyuluhan untuk diusulkan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas pertanian kabupaten maupun provinsi.

Sedangkan hasil penelitian dengan beberapa Informan dari instansi pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur tentang target atau pencapaian tujuan dari instansi tersebut khususnya dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura, diperoleh bahwa hal tersebut belum berjalan secara optimal atau maksimal hal itu disebabkan berbagai hal diantaranya dalam mengubah *mindset* atau cara pandang dan berpikir dari petani yang cukup sulit. Asumsinya pelayanan

publik lewat penyuluhan pertanian dari para penyuluh pertanian dapat diterima jika disertai dengan contoh nyata atau keberhasilan para penyuluh pertanian dalam mempraktikkan pembudidayaan tanaman hortikultura khususnya cabai. Selanjutnya hal yang menghambat produktivitas belum maksimal diupayakan karena jumlah penyuluh pertanian di Kecamatan Motoling Timur yang sangat minim atau tidak sesuai dengan jumlah wilayah binaan, setiap penyuluh pertanian harus memegang dua desa wilayah binaan dengan luas areal penyuluhan yang cukup luas perdesa. Oleh karena itu, secara umum produktivitas dari instansi pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur belum dapat berjalan optimal atau sesuai harapan.

Kualitas Layanan

Definisi kualitas layanan atau kualitas jasa menurut Parasuraman (1988:23) merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi- dimensi pelayanan.

Kualitas pelayanan menurut Stemvelt (2004) adalah suatu persepsi tentang revolusi kualitas secara menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu gagasan yang harus dirumuskan (formulasi) agar penerapannya (implementasi) dapat diuji kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses yang dinamis, berlangsung, terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Sedangkan Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah konsumen/pelanggan.

Pelayanan untuk masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang cukup mendapatkan perhatian bagi aparatur pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat. Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dan aktivitasnya dengan aparatur pemerintah tentu akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan publik ini dilakukan oleh instansi pemerintah lewat aparaturnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan yang merupakan petani tanaman hortikultura khususnya cabai tentang kualitas pelayanan, penyuluhan dan pendampingan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur bisa dilihat ada perbedaan pendapat antar masyarakat yang pada umumnya ada masyarakat yang sudah merasa puas dengan pelayanannya, alasannya karena Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur turun langsung di lahan pada saat pengolahan dan perawatan tanaman. Tetapi ada pula masyarakat yang belum merasa puas dengan pelayanan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling dikarenakan mereka mengharapkan para penyuluh pertanian dapat membantu masyarakat dalam hal ini petani secara spesifik terutama untuk melakukan penyuluhan penanganan

hama dan penyakit tanaman, cara pemberian pupuk dan pestisida serta mengusahakan pengadaan atau pemberian bantuan pertanian.

Selanjutnya sesuai hasil penelitian dengan instansi pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur tentang kontribusi nyata terhadap pelayanan penyuluhan pertanian khususnya di bidang tanaman hortikultura didapat hasil bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur telah mengupayakan untuk memberikan kontribusi secara nyata, salah satunya pemberian bantuan lewat Dinas Pertanian yaitu dengan pengadaan benih dan pupuk khususnya untuk tanaman cabai kepada beberapa kelompok tani, walaupun tetap ada saja beberapa masyarakat yang merasa sudah tidak perlu kontribusi dari penyuluh.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan lembaga atau organisasi termasuk aparatur di dalamnya untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan berbagai program pelayanan baru sesuai pengetahuan dan tuntutan baru terkait waktu, akses dan komunikasi.

Responsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. Responsivitas juga menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan di dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat.

Responsivitas juga menjadi salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Responsivitas menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat dalam hal ini petani khususnya untuk meningkatkan produksi tanaman hortikultura (cabai), peneliti melihat bahwa kembali terjadi perbedaan pendapat yang cukup signifikan antar masyarakat yang merupakan petani tanaman hortikultura khususnya cabai di mana ada masyarakat yang merasa sudah puas dengan alasan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur siap dan hadir di lahan memberi solusi tentang permasalahan tanaman. Sedangkan ada pula masyarakat yang merasa kinerja BPP belum sesuai dengan yang diharapkan, karena dari pihak Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur belum sepenuhnya memberikan penyuluhan mengenai cara memasang mulsa yang baik dan benar, cara menanam, memberikan pupuk dan pestisida, panen sampai pasca panen tanaman cabai. Mereka berharap ke depan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur lebih peka

lagi dan responsif dengan kebutuhan petani di lapangan.

Berikutnya hasil penelitian dengan pihak instansi pemerintah yakni Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur tentang respons atau tanggapan mereka jika ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan penyuluhan, kiat yang harus dilakukan dan prioritas program untuk hal itu maka diperoleh hasil Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur siap merespons langsung, dengan melakukan pendampingan langsung sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang muncul. Dengan prioritas program memberi pelatihan tematik tentang penggunaan pupuk organik dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam penanggulangan masalah yang dihadapi masyarakat yang merupakan petani tanaman hortikultura (cabai). Yang pada dasarnya dari penelitian ini pemerintah berupaya memberikan respons yang tanggap kepada masyarakat, namun kebutuhan masyarakat yang beragam belum biasa menjawabnya secara keseluruhan.

Responsibilitas

Responsibilitas adalah gambaran kualitas pelayanan publik dengan pertanggungjawaban terhadap indikator masing-masing pelayanan sehingga harus ada kesanggupan dari pemberi layanan untuk menetapkan suatu perbuatan kesanggupan untuk menerima risiko dari suatu perbuatan.

Menurut Pinto (Azheri, 2012:89) menyatakan responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati Jadi. Prinsip tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum. Penekanan prinsip responsibilitas yaitu didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada *stakeholder* dengan tidak melakukan tindakan tindakan-tindakan yang merugikan *stakeholder*.

Dilihat dari program Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur apakah sudah berdampak secara langsung khususnya dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura (cabai) hasil penelitian yang didapat dengan informan yakni masyarakat yang merupakan petani hortikultura (cabai) maka sesuai programnya, bagi beberapa masyarakat sudah cukup berdampak karena program dan penyuluhan yang dilakukan membuat produksi cabai mengalami peningkatan. Namun dilain pihak juga masih ada masyarakat yang menganggap belum sepenuhnya berdampak dan ingin kinerja dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur dimaksimalkan lagi, karena masyarakat ingin mengetahui informasi terbaru atau *up to date* dalam dunia pertanian khususnya tanaman yang dikelola mereka yakni tanaman hortikultura (cabai). Oleh karena itu dari hasil yang didapat ini, dampak dari kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling

Timur sudah cukup baik dengan pertimbangan sekiranya dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kedepannya.

Selanjutnya juga hasil penelitian langsung dengan instansi terkait yakni Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur dari informan yang ada baik Koordinator BPP bahkan para penyuluh pertanian tentang kesesuaian program dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kesesuaian program pemerintah secara terstruktur serta risiko yang terjadi jika hal tersebut tidak dilaksanakan telah didapat bahwa hal tersebut telah dilakukan sesuai program yang telah ditetapkan baik dari tingkat pusat sampai di tingkat lapangan dengan para petani alasannya karena mereka juga berdasar atas programa penyuluhan pertanian dan menurut mereka semua program yang disampaikan kepada masyarakat merupakan program pemerintah serta sesuai dengan prinsip administrasi. Dan risiko yang didapat jika itu tidak sesuai yakni ketidakberhasilan atau kegagalan program misalnya produksi tanaman akan menurun dan tingkat kepercayaan masyarakat (petani) akan semakin rendah. Oleh karena itu dari penelitian ini didapat ketidaksesuaian antara program dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur dengan kebutuhan dari masyarakat dalam hal ini petani secara khusus.

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Dalam rangka memahami konsep akuntabilitas sangat dibutuhkan suatu analisis yang jelas dan mendalam sehingga tidak tumpang tindih dengan pengertian responsibilitas. Konsep akuntabilitas ini dijabarkan dengan sangat sederhana oleh berbagai referensi. Dalam literatur Australia, konsep akuntabilitas ini sering dipahami dalam dua pengertian, pertama berkaitan dengan *virtually interchangeable* (dapat dipertukarkan dengan sebenar-benarnya) dan yang kedua berkaitan dengan *closely related* (terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup). Sementara itu, responsibilitas mempunyai sejumlah konotasi termasuk di dalamnya kebebasan untuk bertindak, kewajiban untuk memuji dan menyalahkan, dan perilaku baik yang merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang.

Jadi akuntabilitas dan responsibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan responsibilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otorisasi asimetris misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili, dan sebagainya. Selain itu, kedua konsep tersebut sebetulnya juga mempunyai perbedaan fokus dan cakupannya. Responsibilitas lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang, yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja, sedangkan akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hasil penelitian yang didapat peneliti dengan informan yang merupakan masyarakat petani tanaman hortikultura (cabai) tentang tanggung jawab dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur apakah sudah dilaksanakan secara penuh dalam mengatasi masalah-masalah petani, sebagian besar masyarakat (informan) merasa belum optimal atau belum bertanggung jawab secara penuh, hal ini didasarkan karena masyarakat yang merupakan petani merasa penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan untuk mengatasi hama/penyakit tanaman cabai, obat atau racun yang direkomendasikan kadang gagal di lapangan atau dengan kata lain masih kurang.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan dengan instansi terkait yakni Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur tentang kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menjawab kebutuhan petani baik Koordinator dan para penyuluh pertanian yang ada merasa bahwa kinerja mereka dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan karena keberhasilan petani adalah wujud keberhasilan kinerja dari Penyuluh Pertanian yang ada di BPP itu sendiri. Namun mereka tak memungkiri juga hal itu bisa terwujud jika masyarakat dalam hal ini petani mempercayai mereka sebagai penyuluh dan merespons baik ketika mereka melakukan penyuluhan agar mereka bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan petani khususnya petani cabai dan kendala dari para petani di lapangan dalam hal bantuan penunjang pertanian boleh diusahakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian kepada Dinas pertanian atau instansi terkait.

Dari kedua hasil penelitian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa baik masyarakat (petani tanaman cabai) bahkan pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur saling membutuhkan dukungan dan kerja sama yang intens agar pelaksanaan program dan kerja dari kedua belah pihak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura khususnya cabai terbagi atas kendala teknis dan kendala sosial budaya. Kendala teknis yang dihadapi dalam penyuluhan adalah kondisi petani dan lahan yang kurang memadai, hama dan penyakit yang menyerang tanaman hortikultura khususnya cabai, musim dan cuaca yang tidak menentu, pupuk yang cukup mahal dan langkah, biaya (dari proses pembukaan lahan, alat dan mesin pertanian khususnya dalam pembudidayaan tanaman hortikultura) dan bantuan keperluan pertanian dari pemerintah yang belum didapat secara maksimal dan merata. Sementara itu, kendala sosial budaya disebutkan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam hal ini penyuluh pertanian yakni masih sulitnya mengubah perilaku dan sikap petani agar tertib dalam melakukan budidaya tanaman hortikultura khususnya cabai yang baik dan benar, ada juga pemahaman yang telah melekat tentang bertani secara

tradisional yang dirasa masih lebih mudah untuk diterapkan. Dari hasil wawancara dengan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Motoling Timur bahwa kendala utama yang dihadapi penyuluh pertanian di lapangan adalah partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan yang masih kurang, di mana petani ingin bukti yang nyata terhadap apa yang telah penyuluh sampaikan kepada petani. Selain kendala yang disebutkan di atas, kendala yang juga dihadapi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam hal ini penyuluh pertanian adalah kekurangan sumber daya atau tenaga penyuluh terampil di lapangan. Banyaknya daerah binaan penyuluh yang melebihi kapasitas menyebabkan kinerja penyuluh pertanian menjadi tidak optimal.

Selanjutnya dijabarkan hasil penelitian menurut teori lima ukuran kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto.

a) Produktivitas, di mana didapat secara umum produktivitas dari instansi pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur belum dapat berjalan optimal atau sesuai harapan masyarakat.
b) Kualitas layanan, berdasarkan hasil penelitian bahwa kualitas layanan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur mendapat tanggapan beragam di mana terjadi perbedaan pendapat antar masyarakat yang pada umumnya ada masyarakat yang sudah merasa puas dengan pelayanannya, tetapi ada pula masyarakat yang belum merasa puas dikarenakan mereka mengharapkan para penyuluh pertanian dapat membantu masyarakat dalam hal ini petani secara lebih spesifik.
c) Responsivitas, pada indikator penelitian ini didapat bahwa pemerintah berupaya memberikan respons yang tanggap kepada masyarakat, namun kebutuhan masyarakat yang beragam belum biasa menjawabnya secara keseluruhan permasalahan yang ada.
d) Responsibilitas, dari indikator penelitian ini didapat ketidaksesuaian antara program dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur dengan kebutuhan dari masyarakat dalam hal ini petani secara khusus.
e) Akuntabilitas, dari hasil penelitian pada indikator ini diperoleh bahwa baik masyarakat (petani tanaman hortikultura) bahkan pemerintah dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur harus saling memberikan dukungan dan kerja sama yang intens agar pelaksanaan program dan kerja dari kedua belah pihak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Maka secara keseluruhan hasil dari kelima indikator ukuran kinerja menurut Agus Dwiyanto tersebut menunjukkan kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Motoling Timur dalam meningkatkan produksi tanaman hortikultura sudah cukup efektif, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kendala dimasyarakat yang harus segera

ditangani dan perlu adanya peningkatan kualitas baik dari segi pelayanan dan penyuluhan, kesesuaian program dengan kebutuhan di lapangan, serta lebih peka lagi dengan masalah-masalah atau keluhan yang dihadapi oleh masyarakat agar tercapai tujuan yang diharapkan baik oleh pemerintah dalam hal ini BPP Kecamatan Motoling Timur bahkan para petani yang adalah masyarakat.

Saran

Berdasarkan tinjauan peneliti ketika melaksanakan penelitian ini, ada beberapa kekurangan yang didapatkan dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar kinerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Motoling Timur lebih dimaksimalkan lagi dengan meningkatkan sumber daya penyuluh, baik dari sisi kuantitas atau jumlah karena masih kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang tidak seimbang dengan wilayah binaan, maupun dari segi kualitas dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan program lainnya yang dapat mendukung dan meningkatkan kapasitas dari para penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur. Selain itu, penting juga untuk sekiranya mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi para penyuluh, baik dari segi transportasi, tunjangan kinerja, alat peraga penyuluhan dan lain sebagainya serta dukungan penuh masyarakat khususnya para petani agar para penyuluh pertanian dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Selain itu diharapkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Motoling Timur kiranya dapat lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat dalam hal ini petani di lapangan, cepat tanggap dalam mengatasi masalah yang ada dengan melakukan penyuluhan secara konstan, efisien dan akuntabel.

Daftar Pustaka

_____. (1996). *The World Book Encyclopedia (International).* Volume 9, p312, London, Sydney, Tunbridge Wells, Chicago: World Book Inc.

A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. 1988. *"SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality"*. Journal of Retailing. Vol 64 (1) pp 12- 37

Achmad, S. Ruky. 2006. *Sistem Manajemen Kenerja*. Jakarta: Aditama. PT. Gramedia Pustaka.

Agus Dwiyanto. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.

Allen dan Meyer. 2015. *Organizational commitment: Evidence of career stage effects*. Journal of Business Research, 26, 49-61.

Asmarantaka, R.W. 2012. *Pemasaran Agribisnis (Agrimarketing*). Departemen Agribisnis. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajeman. Institut Pertanian Bogor.

Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bahua, M.I. 2016. *Kinerja Penyuluh Pertanian.* Yogyakarta: Deepublish CV Budi utama.

Berlian, M. 2014. *Peran Penyuluh Pertanian Lapangan dan Partisipasi Petani dalam Program Feati Serta Pengaruhnya Terhadap*

Pendapatan Petani Di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Jurnal Matematika, Saint, Dan Teknologi, 15(1), 52–62.

Dessler, Gary. 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia.* Jakarta: PT. Prenhallindo.

DR.H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gomes. 2001. *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Andi offset.

Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.

Inten, Sekar. Dewi Elviana dan Budi Rosen Nover. 2017*. "Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Komoditas Padi Di Kecamatan Tanjungselor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara"*. Jurnal Agrifor-Volume XVI Nomor 1 Maret : 2017 ISSN P : 1412-68851 ISSN O : 2503-4960 103. Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan.

Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. *Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik:* Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia.* Bandung: PT Refika Aditama.

Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mangkuprawira, S, dan A.V. Hubeis. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mardikanto, Totok, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Mochamad Muslih *et al.* 2019. *Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.

Mokhtar, S.M. (2001). *Kinerja Lembaga Penyuluhan Pertanian dan Adopsi Inovasi Kedelai serta Implikasi pada Pelaksanaan Otoda di Kab. Kotawaringin Timur.*(Tesis tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.

Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda.

Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian.* Jakarta: Edisi Ke-Tiga. LP3S.

Mulyadi dan Johny Setiawan. 2005. *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen , sistem pelipat ganda, Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nicholson, W. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa oleh IGN Bayu Mahendra dan Abdul Aziz. Yogyakarta: Erlangga.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Putong. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan* Makro. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardi *et al*. 2003. *Agribisnis Tanaman Perkebunan*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Randhawa. Gurpreet. 2007. *Work Performance and Its Correlates: And Empirical Study.* Vision - The Journal of Business Perspective, Vol. 11 No. 1, p 47-55.

Robbins, S. P. 2003 *Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi Aplikasi*. Edisi Kedelapan. Trans. Pujaatmaka, H & Molan, B. Jakarta: Pt. Prenlindo.

Said Sa'ad Marthon. 2004. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global.* Jakarta: Zikrul Hakim.

Saputro, M. A. P., dan W. H. Susanto. 2016. *Pembuatan Bubuk Cabai Rawit (Kajian Konsentrasi Kalsium Propionat dan Lama Waktu Perebusan terhadap Kualitas Produk)*. Pangan dan Agroindustri. 4(1): 62-71.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya*. Bandung: Cetakan Ketiga.

Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Stemvelt, Robert C. 2004. *(Diterjemahkan oleh Purwoko) Perception of Service Quality*. Allyn and Bacon, Massachusetts.

Sudarsono. 1984. *Pengantar Ekonomi Mikro: Edisi 2, Cetakan 2.* Jakarta Barat: PT Djaya Pirusa.

Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Swartono, dan Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Tjandra, W. Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Referensi lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2016

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Website Resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia